

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa proses penyelesaian sengketa melalui Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Barat berupa mediasi dan peradilan adat yang memiliki tahapan atau tata laksana penyelesaian sengketa perjanjian pinjam pakai benda magis yang diselenggarakan menurut adat-istiadat setempat dengan ketentuan proses segala tahapan disampaikan secara lisan kecuali sarana adat. Penyelesaian sengketa perjanjian pinjam pakai benda magis terhadap masyarakat hukum adat Dayak Benuaq itu diselesaikan melalui kesepakatan para pihak dengan itikad baik untuk menyerahkan sebuah piring putih atau disebut dengan *penenungk* sebagai suatu syarat awal pengajuan gugatan (*nenukng*), selanjutnya akan diproses oleh Lembaga Adat Besar yang memandatkan sengketa itu kepada Kepala Adat Besar atau *mantiiq solai* untuk mempelajari kasus yang telah diajukan oleh para pihak itu dengan berbagai pertimbangan dan memutus sengketa itu dengan berdasarkan adat sukat Dayak Benuaq. Lembaga Adat Besar juga boleh berinisiatif untuk menyelesaikan sengketa adat tanpa mengajukan gugatan atau *nenukng* bila hal tersebut mengganggu keseimbangan kosmis masyarakat hukum adat karena dipandang merupakan delik adat berat.

2. Peran Lembaga Adat Besar dalam menyelesaikan sengketa perjanjian pinjam pakai benda magis telah melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan *legal standing* yang didasari dari Pasal 8 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 24 Tahun 2001 tentang Pemberdayaan, Pelestarian, Perlindungan dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat mengenai hak dari Lembaga Adat Besar dalam menyelesaikan sengketa perdata adat yang mencakup kebiasaan masyarakat hukum adat Dayak Benuaq, Pasal 7 ayat (2) huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pengukuhan dan Pembinaan Masyarakat Hukum Adat dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat mengenai tugas untuk menyelesaikan sengketa perdata adat masyarakat hukum adat Dayak Benuaq di daerah kabupaten Kutai Barat dan Pasal 15 huruf b dan huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat mengenai tugas dan fungsi untuk menyelesaikan sengketa masyarakat hukum adat Dayak Benuaq dan melaksanakan sanksi adat dan peradilan adat yang dilaksanakan sesuai dengan kebiasaan masyarakat hukum adat setempat dengan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

B. Saran

Bagi masyarakat hukum adat Dayak Benuaq yang bersengketa agar dapat secara bersama-sama membicarakan segala unsur yang terdapat dalam perjanjian yang dilaksanakan oleh para pendahulu dengan itikad baik tanpa perlu

mengajukan atau menuntut suatu permasalahan yang sebelumnya dianggap oleh pendahulu tersebut sebagai sesuatu hal yang biasa.

Bagi Lembaga Adat Besar untuk tetap mempertahankan dan melestarikan kebudayaan serta kearifan lokal masyarakat hukum adat di Kabupaten Kutai Barat dan memperluas regulasi dengan lembaga adat lain di luar Kabupaten Kutai Barat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aidul Fatriciada Azhari, 2014, *Rekonstruksi Tradisi Bernegara dalam UUD 1945*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Bushar Muhammad, 1995, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Pradaya Pramita, Jakarta.
- Dalmaasius Madrah T, 2001, *Adat Sukat Dayak Benuaq dan Tonyooi*, Puspa Swara, Jakarta.
- Draft Laporan Pengkajian Hukum tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat, 2015, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. Jakarta.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2018, *Metode Penelitian Hukum (Langkah – Langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum)*, *cet.1*, Refika Aditama, Bandung.
- Hilman Hadikusuma, 1979, *Hukum Pidana Adat*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Hilman Hadikusuma, 1982, *Hukum Perjanjian Adat*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Husein Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah*, Yogyakarta, 2010.
- Iman Sudiyat, 1981, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta
- Johny Ibrahim, 2012, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing, Malang
- Michael Olson, 1995, *Linguist*, Versi 0.1, (PT Atlantis Programma Prima, t.th). Mariasusa Dhavamony, *Fenomenologi Agama*, (Kanisius, Yogyakarta),
- Perpustakaan Mahkamah Agung RI, 2000, *Laporan Penelitian Alternatif Desupte Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif) dan Court Connected Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa yang terkait dengan Pengadilan)*.
- Rikardo Simarmata, 2006, *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat di Indonesia*, UNDP Regional Centre in Bangkok, Jakarta.
- Soepomo, 1979, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Suyud margono, 2004, *ADR (alternative dispute resolution) & Aribtrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor

Taqwaddin, 2010, “Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat (Mukim) di Provinsi Aceh”, (Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara),

Tolib Setiyadi, S.H., M.Pd, M.H. ,2013, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, ALFABETA CV, Bandung.

B. Jurnal:

Al-I’lam; Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam Vol. 2, No 1, September 2018, pp. 62-76

Inda Fitryarini, Rina Juwita, Purwaningsih, 2014, “Model Literasi Media Berbasis Kearifan Lokal pada Suku Dayak Tunjung dan Dayak Benuaq di Kutai Barat”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Volume 17, Nomor 3, Maret 2014 (207-219) ISSN 1410-4946.

Nevei Varida Ariani, 2012, “Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan” *Jurnal Rechts Vinding- Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 1 Nomor 2 Agustus 2012, Badan Pembinaan Hukum Nasional.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di

Provinsi Kalimantan Timur. Lembaran Negara Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 Nomor 1. Sekretariat Daerah, Samarinda.

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 24 Tahun 2001 tentang Pemberdayaan, Pelestarian, Perlindungan dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat. Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 24. Sekretariat Daerah, Sendawar.

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 12 Tahun 2006 tentang pengukuhan dan pembinaan Masyarakat Hukum Adat dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat. Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2006 Nomor 12. Sekretariat Daerah, Sendawar.

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2017 Nomor 13. Sekretariat Daerah, Sendawar.

D. Website:

<http://kutaibaratkab.go.id/sejarah/>, Sejarah Pembentukan Kabupaten Kutai Barat, diakses 19 september 2019

<http://www.kubarkab.go.id>, diakses 25 September 2019

<https://www.kajianpustaka.com/2018/10/pengertian-jenis-penyebab-dan-penyelesaian-sengketa.html>, diakses 25 September 2019.

<https://www.romadecade.org/suku-dayak/>, suku Dayak: sejarah, kebudayaan dan Adat Istiadat, diakses 25 September 2019.

<https://www.plengdut.com/2019/09/hukum-adat-indonesia-sifat-corak.html?m=1>, diakses 26 januari 2020.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Benda, diakses 18 September 2019